

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki ekonomi yang dinamis dimana Indonesia kerap menghadapi tantangan dalam mempertahankan kestabilan ekonominya. Kondisi ekonomi menjadi prioritas utama yang harus dijaga (Yanti dan Soebagyo, 2022). Kondisi perekonomian Indonesia sangat bergantung pada situasi global dan stabilitas moneter (Agusmianata, Militina dan Lestari, 2017). Misalnya, pada tahun 2020, Indonesia mengalami kontraksi ekonomi sebesar -2,07% akibat dampak pandemi COVID-19 yang menurunkan aktivitas ekonomi, mengganggu rantai pasokan, dan menekan harga komoditas. Pada tahun 2021, Indonesia juga menghadapi tantangan dari kenaikan harga minyak dunia, pelemahan nilai tukar rupiah, dan ketidakpastian geopolitik (Rasulong, 2022).

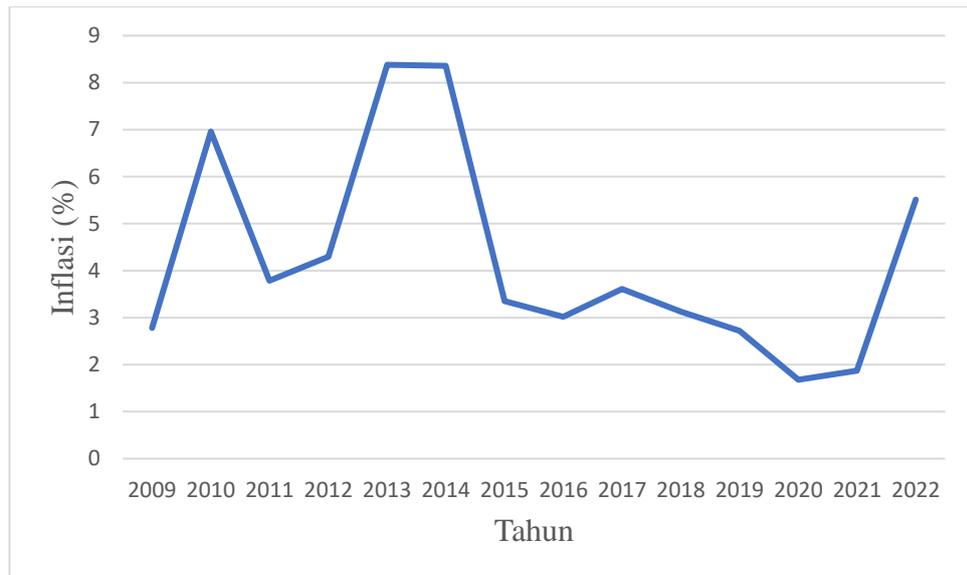
Salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan menghambat pertumbuhan ekonomi adalah terjadinya kenaikan harga secara terus menerus dan umum, atau yang biasa disebut inflasi. Inflasi yang memiliki potensi menimbulkan dampak negatif pada struktur biaya produksi dan tingkat kesejahteraan, merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap gejolak ekonomi dan ditakuti oleh pemerintah. Inflasi juga digunakan untuk mengukur stabilitas ekonomi suatu negara, sehingga hal ini menjadi salah satu masalah ekonomi yang menjadi perhatian para ekonomi (Putri, 2017). Secara umum, inflasi adalah suatu perkembangan ekonomi dimana harga dan upah naik, permintaan tenaga kerja melebihi penawaran, dan jumlah uang beredar meningkat tajam. Inflasi

selalu ditandai dengan kenaikan harga yang cepat (Perlambang, 2012). Inflasi adalah fenomena kenaikan harga barang secara berkelanjutan. Inflasi dapat berpengaruh baik atau buruk terhadap perekonomian. Mankiw (2010) mendefinisikan inflasi sebagai peningkatan harga secara keseluruhan, dan harga tersebut merupakan tukar-menukar antara uang dengan barang dan jasa. Nopirin (2014) menyatakan bahwa kenaikan yang hanya terjadi satu kali, walaupun dengan persentase yang tinggi tidak termasuk inflasi.

Dampak buruk yang mungkin timbul jika inflasi tidak sesuai adalah penurunan nilai uang, yang berakibat pada penurunan kemampuan beli masyarakat, khususnya masyarakat dengan penghasilan yang tetap. Inflasi yang sangat tinggi dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat dan juga dapat mengganggu distribusi dan alokasi pendapatan dan faktor produksi di suatu negara (Solihin, 2011).

Namun, di balik stigma negatifnya, inflasi juga menyimpan beberapa dampak positif yang perlu ditelaah secara ilmiah. Salah satu dampak positif inflasi yang paling signifikan adalah peningkatan pendapatan dan keuntungan. Bagi pengusaha, kenaikan harga produk memungkinkan mereka untuk meningkatkan margin keuntungan, meskipun biaya produksi turut meningkat. Hal ini dapat mendorong investasi, ekspansi bisnis, dan pada akhirnya, menciptakan lapangan pekerjaan baru. Inflasi moderat juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui beberapa mekanisme. Meningkatnya ekspektasi inflasi dapat mendorong konsumsi masyarakat, karena kekhawatiran harga akan terus naik di masa depan. Hal ini memicu peningkatan permintaan dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, inflasi dapat meningkatkan daya saing ekspor

suatu negara. Di negara dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi dibandingkan negara lain, produk ekspor menjadi lebih murah dan kompetitif di pasar internasional. Hal ini dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor perdagangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi (CNN Indonesia, 2022).



Sumber: Bank Indonesia

Gambar 1.1 Grafik Tingkat Inflasi di Indonesia Periode 2009-2022

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa tingkat inflasi di Indonesia periode 2009-2022 mengalami fluktuasi, dimana inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 8,38% karena guncangan krisis finansial yang terjadi pada tahun tersebut. Inflasi terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,68 %. Tahun 2009 inflasi mengalami penurunan signifikan akibat krisis keuangan global, mencapai level terendah 2,77% pada bulan Desember. Tahun 2010-2011 inflasi mulai meningkat kembali, didorong oleh kenaikan harga pangan dan energi. Puncaknya terjadi pada bulan September 2011 dengan tingkat inflasi 3,82%. Tahun 2012 inflasi relatif stabil di 4,3%. Di tahun 2013-2014 inflasi kembali meningkat, terutama menjelang

Pemilu Presiden 2014. 2015-2016 inflasi terkendali di sekitanr angka 3% akibat kebijakan pemerintah, termasuk subsidi BBM dan paket stimulus ekonomi. 2017 inflasi kembali meningkat, mencapai 3,61%, 2018 inflasi relatif stabil di sekitar 3%. 2019 inflasi mengalami tren naik dan mencapai 2,72% pada akhir tahun. Tahun 2020 dengan adanya pandemi COVID-19 menyebabkan deflasi pada beberapa bulan awal tahun. Namun, inflasi kembali naik pada paruh kedua tahun, mencapai 1,68% pada akhir tahun. Tahun 2021 inflasi masih terkendali di bawah 2% dan tahun 2022 inflasi mulai meningkat signifikan sejak awal tahun, terutama didorong oleh kenaikan harga pangan dan energi global akibat perang di Ukraina, inflasi mencapai 5,51%, level tertinggi sejak 2017.

Inflasi dapat berdampak baik jika terjadi pada tingkat yang relatif rendah, sekitar 2-3% per tahun. Inflasi ini dapat meningkatkan nilai uang, memotong nilai harga barang dan jasa, dan membantu mengurangi kemungkinan pengurangan nilai uang dan pengurangan tingkat harga. Namun, jika inflasi terlalu tinggi, sekitar 5% atau lebih per tahun, maka dapat menyebabkan kemungkinan peningkatan harga barang dan jasa, peningkatan biaya pengeluaran, dan peningkatan tingkat harga. Inflasi yang baik dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membantu meningkatkan daya beli masyarakat, dan membantu meningkatkan nilai uang (Maruf, 2022).

Saat ini juni 2024 Indonesia mengalami penurunan inflasi atau disebut dengan deflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan adanya deflasi sebesar 0,08% (mtm) pada bulan Juni 2024, yang berarti secara tahunan (yoy) mencapai 2,51%. Di sisi lain, terjadi inflasi 1,07% (ytd) dalam periode Januari-Juni 2024.

Meskipun secara nasional terjadi deflasi, BPS mencatat kenaikan harga beberapa bahan pangan, seperti cabai, dan biaya sekolah di beberapa wilayah. Hal ini menjadi faktor pendorong inflasi di wilayah tersebut pada Juni 2024. Menurut Ekonom Universitas Indonesia, Ninasapti Triaswati, deflasi yang terjadi pada Mei dan Juni 2024 tidak mengejutkan. Secara historis, deflasi selalu terjadi setelah periode kenaikan harga pada hari raya dan libur panjang (CNBC Indonesia, 2024).

Terdapat beberapa aspek yang dapat menyebabkan inflasi di Indonesia diantaranya, yaitu *Inflation Targeting Framework* (ITF), suku bunga, dan jumlah uang beredar. Oleh karena itu, mengendalikan inflasi menjadi salah satu tujuan utama kebijakan moneter. Natsir dalam Hartanto (2006) mengemukakan kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang dan tingkat bunga dalam perekonomian. Tujuan akhir kebijakan moneter adalah untuk mencapai stabilitas harga, stabilitas nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Salah satu kerangka kerja kebijakan moneter yang banyak diterapkan oleh bank sentral di dunia adalah *Inflation Targeting Framework* (ITF). ITF adalah suatu kerangka kerja kebijakan moneter yang menetapkan sasaran inflasi sebagai tujuan utama dan indikator kinerja kebijakan moneter. Sejalan dengan pernyataan Mankiw (2010) bahwa ITF merupakan sebuah kerangka kebijakan moneter dengan cara menentukan sasaran tunggal yaitu inflasi. Disebut juga merupakan kebijakan dimana bank sentral mengumumkan target, atau kisaran target yang spesifik, untuk tingkat inflasi. ITF pertama kali diterapkan oleh Selandia Baru pada tahun 1990. Implikasi dari penerapan ITF menyebabkan laju inflasi di Selandia Baru berada

pada satu digit. Selandia Baru konsisten menjaga tingkat inflasi yang berada pada range 0- 2%. Penerapan ITF di negara Kanada menemui titik keberhasilan dengan laju inflasi berkisar antara 1-3% dari tahun 1991 hingga tahun 1998. Inflasi di negara Cile mengalami penurunan drastis dari 20% menjadi 2% dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dari tahun 1991 hingga tahun 2002 (Dwi, 2017).

Indonesia baru menerapkan ITF pada tahun 2005. Penerapan ITF bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang dan mengendalikan inflasi, yang merupakan salah satu faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan ITF, bank sentral berkomitmen untuk mencapai sasaran inflasi yang telah ditetapkan dan diumumkan secara transparan, serta menggunakan berbagai instrumen moneter untuk mempengaruhi permintaan dan penawaran uang (Hartanto, 2006).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terlihat bahwa pemerintah Indonesia melalui lembaga moneter (Bank Indonesia) mengarahkan kebijakan moneter sebagai salah satu kebijakan makro untuk mempertahankan stabilitas ekonomi. Mulai bulan Juli 2005 (setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 direvisi, dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia) kebijakan moneter Indonesia ditujukan untuk mencapai sasaran tunggal yaitu inflasi atau ITF (Maggi dan Saraswati, 2013).

Namun, ITF juga dapat memiliki dampak negatif terhadap inflasi, terutama di negara-negara berkembang yang memiliki struktur ekonomi yang kurang stabil dan fleksibel. ITF dapat menyebabkan inflasi berfluktuasi secara tajam jika terjadi guncangan eksternal atau internal yang tidak terduga, seperti krisis keuangan,

bencana alam, atau konflik sosial (Bank Indonesia, 2011). Hal ini karena ITF mengharuskan bank sentral untuk menyesuaikan suku bunga secara cepat dan agresif untuk mencapai target inflasi, yang dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi dan permintaan agregat.

ITF dapat mengabaikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi inflasi, seperti pertumbuhan uang beredar, nilai tukar riil, produk domestik bruto, dan tingkat pengangguran, penelitian Roeroe (2020) menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut memiliki korelasi yang signifikan dengan inflasi, baik positif maupun negatif. Jika bank sentral hanya fokus pada target inflasi, maka dapat mengakibatkan kesalahan kebijakan yang dapat memperburuk kondisi ekonomi. ITF dapat mengurangi kredibilitas dan otonomi bank sentral jika target inflasi tidak tercapai secara konsisten. Hal ini dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan moneter dan kinerja bank sentral. Akibatnya, ekspektasi inflasi dapat meningkat dan memperparah inflasi itu sendiri.

Studi Bank Indonesia (2014) menyimpulkan ITF berpengaruh signifikan terhadap inflasi, meningkatkan kredibilitas dan transparansi kebijakan moneter, serta mendorong disiplin fiskal. Penelitian yang dilakukan Fortius (2022) menunjukkan ITF mempunyai dampak yang signifikan terhadap penurunan tingkat inflasi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi panel fixed effect dengan penggunaan klastering standar error di tingkat negara selama periode 2000-2010. Fithriani (2017) menemukan bahwa baik ITF jangka pendek maupun jangka panjang berkorelasi positif dengan inflasi, menunjukkan komitmen dan konsistensi kebijakan ITF dalam menjaga stabilitas harga.

Selanjutnya yang mempengaruhi inflasi adalah suku bunga atau dikenal juga dengan *BI Rate* yang merupakan kebijakan yang menggambarkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik (Dewi dan Haryanto, 2015). Tingkat suku bunga dapat menjadi tolak ukur yang memicu pertumbuhan ekonomi. Tingkat suku bunga yang tinggi dapat mendorong investor untuk lebih memilih menyimpan uangnya pada bank, sehingga laju inflasi dapat terkendali. Sedangkan, tingkat suku bunga yang rendah membuat masyarakat cenderung lebih memilih memegang uangnya dibandingkan menyimpannya di bank, yang dapat menyebabkan jumlah uang beredar semakin bertambah, sehingga harga barang meningkatkan dan menyebabkan terjadinya inflasi.

Suku bunga yang diterapkan pada pinjaman memiliki peran penting dalam industri perbankan. Secara umum, tingkat suku bunga pinjaman ditetapkan oleh bank sentral sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam industri perbankan. Meskipun demikian, setiap bank umum memiliki kewenangan khusus untuk menentukan tingkat suku bunga pinjaman, tetapi tidak boleh melebihi suku bunga yang telah ditetapkan oleh bank sentral.

Bank sentral memiliki seperangkat kebijakan yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi untuk mengatur stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Tidak mengherankan, karena bank sentral adalah pemegang otoritas tertinggi dalam menentukan kebijakan moneter. Berkat kewenangan ini, bank sentral juga dapat memanipulasi suku bunga jangka pendek untuk memengaruhi tingkat inflasi dalam perekonomian (Ferzi, 2022).

Ketika suku bunga naik, hal ini cenderung menurunkan permintaan pinjaman, yang pada gilirannya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menekan laju inflasi. Selain itu, kenaikan suku bunga simpanan juga dapat menyerap lebih banyak uang yang beredar, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Sebaliknya, ketika suku bunga turun, hal ini cenderung mendorong pertumbuhan ekonomi dan dapat meningkatkan tingkat inflasi. Dengan demikian, perubahan suku bunga dapat berdampak pada inflasi melalui pengaruhnya terhadap aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Kenaikan suku bunga yang diberlakukan oleh Bank Indonesia (BI) berpotensi menyebabkan tingkat inflasi meningkat, sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami koreksi atau penurunan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kenaikan suku bunga acuan secara otomatis akan mengurangi konsumsi masyarakat. Namun, kondisi ini memiliki risiko, karena jika inflasi terus meningkat hingga melampaui pertumbuhan ekonomi, maka kesejahteraan masyarakat akan menurun. Penurunan kesejahteraan ini dapat tercermin dari melemahnya tingkat konsumsi (Ferzi, 2022).

Hasil penelitian Ratri (2022), menyatakan bahwa berdasarkan hasil estimasi jangka pendek BI Rate berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap inflasi. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh negatif BI Rate terhadap inflasi membuktikan teori tingkat bunga dan teori Fisher Effect. Sedangkan pengaruh tidak signifikan BI Rate menunjukkan bahwa tidak sesuai dengan hipotesis yang mana BI Rate mempengaruhi secara signifikan terhadap inflasi. Hasil penelitian dalam jangka pendek tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh

Ningsih & Kristiyanti (2018) yang menguji pengaruh jumlah uang beredar, suku bunga dan nilai tukar terhadap inflasi di Indonesia periode 2014–2016, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh BI Rate yang tidak signifikan terhadap inflasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suku bunga memiliki hubungan yang erat dengan kestabilan inflasi di Indonesia. Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi tingkat inflasi, dan kebijakan suku bunga yang tepat dapat membantu mengendalikan inflasi dan menciptakan kestabilan ekonomi secara keseluruhan.

Jumlah uang beredar memegang peran penting dalam perekonomian suatu negara, dan memiliki hubungan erat terhadap tingkat inflasi. Jumlah uang beredar, juga dikenal sebagai money supply, adalah total nilai uang yang berada di tangan masyarakat dalam suatu perekonomian. Ini meliputi semua jenis uang yang beredar, termasuk uang kartal (uang kertas dan logam) dan uang giral (uang yang berada di rekening bank). Besarnya uang beredar dipengaruhi oleh interaksi antara masyarakat, lembaga keuangan, dan bank sentral. Dalam jangka panjang, perubahan ini akan berdampak pada tingkat harga, sedangkan pengaruhnya terhadap output riil relatif kecil (Salsabila, 2022).

Apabila jumlah uang beredar mengalami penambahan volume maka akan menyebabkan inflasi. Pada teori kuantitas mengemukakan bahwa bertambahnya volume uang (uang giral ataupun uang kartal) yang memicu peningkatan terhadap harga barang dan jasa akan munculnya inflasi. Namun dalam teori Keynes mengungkapkan bahwa bukan hanya jumlah uang saja yang menyebabkan inflasi,

inflasi juga terjadi apabila pelaku ekonomi ingin hidup diluar batas kemampuan ekonomi yang dimilikinya atau terjadinya ketidakseimbangan ketika permintaan masyarakat melebihi jumlah barang atau jasa yang tersedia sehingga terjadinya kenaikan harga atau dapat disebut dengan *inflationary gap* (Kalalo, Rotinsulu dan Maramis, 2016).

Jumlah uang beredar memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Besarnya jumlah uang beredar dapat mempengaruhi daya beli riil masyarakat dan tersedianya komoditi kebutuhan. Oleh karena itu, jumlah uang beredar harus dikendalikan secara wajar agar tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Kondisi ini sangat relevan dalam konteks Indonesia, di mana jumlah uang beredar yang ada di tangan masyarakat harus dapat berkembang secara wajar untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara.

Berdasarkan hasil penelitian Aditya (2021) dapat diketahui bahwa jumlah uang beredar signifikan mempengaruhi inflasi. Hasil tersebut menyatakan bahwa banyaknya jumlah uang beredar di Indonesia pada rentang tahun 2010-2020 mempengaruhi tingkat inflasi secara signifikan. Hal tersebut sejalan dengan teori bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi inflasi adalah uang beredar semakin banyak uang yang beredar maka akan menyebabkan meningkatnya harga-harga dan kenaikan harga tersebut menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astawan (2017) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh jumlah uang beredar, harga premium, dan tingkat suku bunga terhadap tingkat inflasi di indonesia periode 2006-2015 yang

menyatakan bahwa jumlah uang beredar mempengaruhi inflasi secara positif dan signifikan.

Penelitian yang dilakukan Ananta dan Widodo (2021) serta Firdaus (2022) juga menunjukkan pengaruh jumlah uang beredar yang signifikan terhadap inflasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Keynes bahwa motif permintaan masyarakat akan uang adalah untuk keperluan transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi. Hal ini disebabkan oleh data jumlah uang beredar meningkat setiap tahun dan tingkat inflasi yang berfluktuasi setiap tahunnya. Dengan demikian besar kecilnya jumlah uang beredar merupakan salah satu faktor yang menentukan besar kecilnya tingkat inflasi yang terjadi di daerah tersebut. Ketika jumlah uang beredar suatu daerah meningkat secara terbatas, maka tingkat inflasi di daerah tersebut akan menurun.

Berdasarkan fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap “**Pengaruh *Inflation Targeting Framework*, Suku Bunga, dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Inflasi di Indonesia Tahun 2009-2022**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *Inflation Targeting Framework*, suku bunga, dan jumlah uang beredar secara parsial terhadap inflasi di Indonesia tahun 2009-2022?

2. Bagaimana pengaruh *Inflation Targeting Framework*, suku bunga, dan jumlah uang beredar secara bersama-sama terhadap inflasi di Indonesia tahun 2009-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari identifikasi masalah yang diambil oleh peneliti, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Inflation Targeting Framework*, suku bunga, dan jumlah uang beredar secara parsial terhadap inflasi di Indonesia tahun 2009-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Inflation Targeting Framework*, suku bunga, dan jumlah uang beredar secara bersama-sama terhadap inflasi di Indonesia tahun 2009-2022.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat berguna sebagai bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya dan berguna untuk pengembangan ilmu ekonomi. adapun kegunaan dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman mendalam mengenai pengaruh dari *inflation targeting*

framework, suku bunga, dan jumlah uang beredar terhadap inflasi di Indonesia tahun 2009-2022.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk merumuskan strategi kebijakan yang berkaitan dengan *inflation targeting framework*, suku bunga, dan jumlah uang beredar terhadap inflasi untuk mencapai Indonesia yang lebih baik.

3. Bagi Lingkungan Akademik dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan sebagai bahan perbandingan penelitian yang sejenis.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di negara Indonesia. Dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder, data sekunder diperoleh dari dokumentasi, studi kepustakaan melalui bantuan dari media cetak dan media internet. Lokasi penelitian ini pula diperoleh dari media cetak dan media internet yaitu diperoleh dari Bank Indonesia.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini dibuat sebagai matriks acuan agar penelitian dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Adapun rincian kegiatan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

